

GOVERNMENT BUREAUCRACY AND POLICY CAPACITY

PERTEMUAN 15

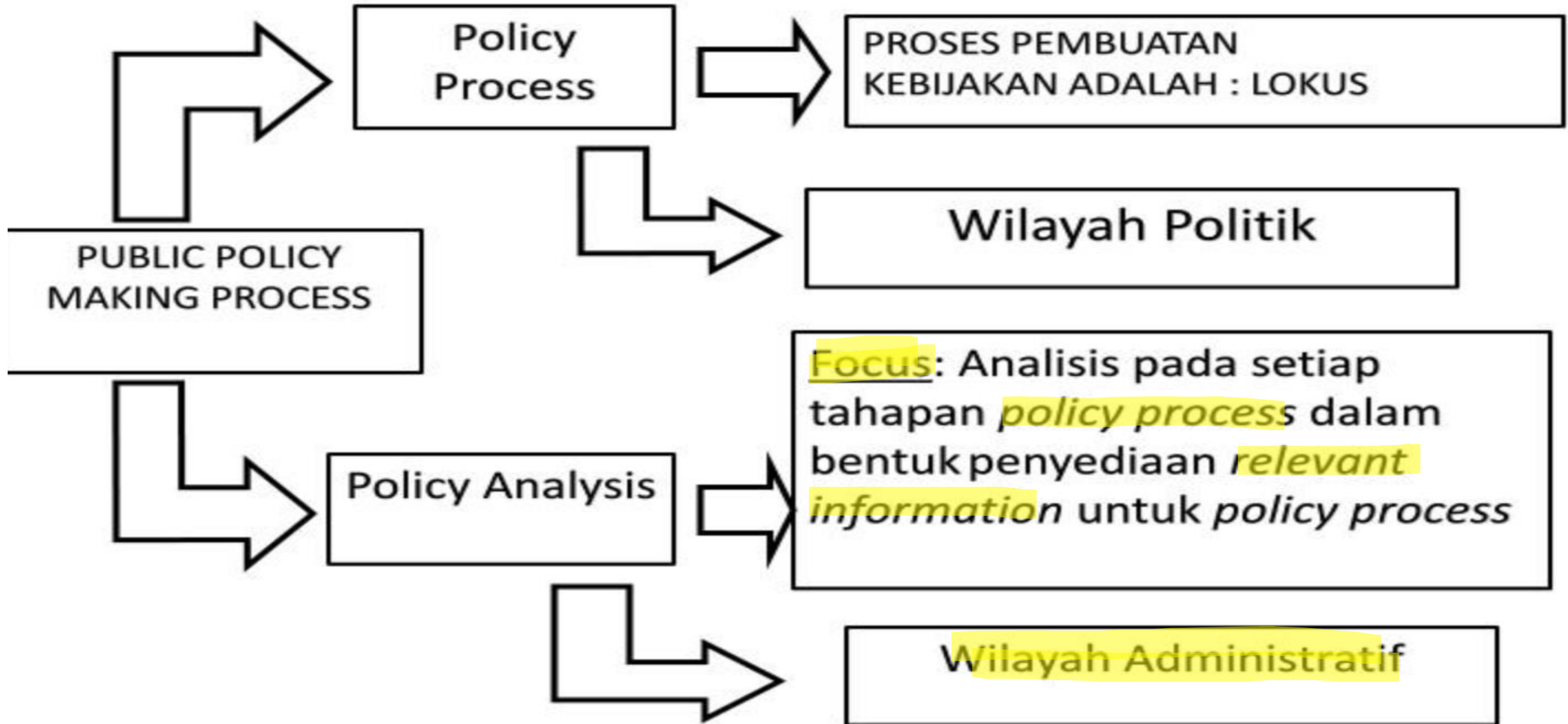
Prof. Novita Tresiana

DASAR FILOSOFIS SEBUAH KEBIJAKAN PUBLIK

**“SETIAP KEPUTUSAN TIDAK SEMATA-MATA
DIDASARKAN PADA KOMPETENSI LEGAL,
TETAPI JUGA HARUS MEMENUHI NILAI-NILAI
KEBENARAN ETIK DI DALAMNYA”**

(Prof. Dr. Djokosantoso Moeljono, 2010)

KEBIJAKAN PUBLIK



4 FUNGSI FUNDAMENTAL BIROKRASI

Fungsi administrasi

- ASN terlibat secara eksklusif dalam tanggung jawab administratif yang berkisar dari bagaimana pelaksanaan (implementasi)

Fungsi Politik

- birokrasi memberikan jaminan bahwa pemerintahan dilaksanakan dengan cara yang tertib dan dapat diandalkan. Stabilitas ini sangat bergantung pada status birokrat sebagai pegawai negeri/ASN yang permanen dan profesional

Fungsi Artikulasi Kepentingan

- birokrasi dihubungkan dengan kelompok kepentingan (keberagaman) melalui tugas ***pelaksanaan kebijakan dan keterlibatannya dalam perumusan dan nasihat kebijakan.***

Fungsi Penasihat Kebijakan (policy advisor).

- *pemilik informasi kebijakan dan nasihat yang tersedia bagi pemerintah dalam pemilihan alternatif dan memeriksa naskah-naskah kebijakan*

HUBUNGAN BIROKRASI SEBAGAI POLICY ADVISOR DAN PUBLIC POLICY

WILSONIAN: eksekutor, ketrampilan teknis-professional, tidak ada kepentingan politik (relevansi kebijakan-kepentingan birokrasi) : netralitas



BIROKRASI-POLITIK (TEORI POLITISASI BIROKRASI): campur tangan keputusan dan kebijakan birokrasi-perubahan kental (pihak eksternal)



INDEPENDENCE MODEL: profesionalitas, otonomi birokrasi dan keleluasaan-kewenangan

BIROKRASI SEBAGAI POLICY ADVISOR

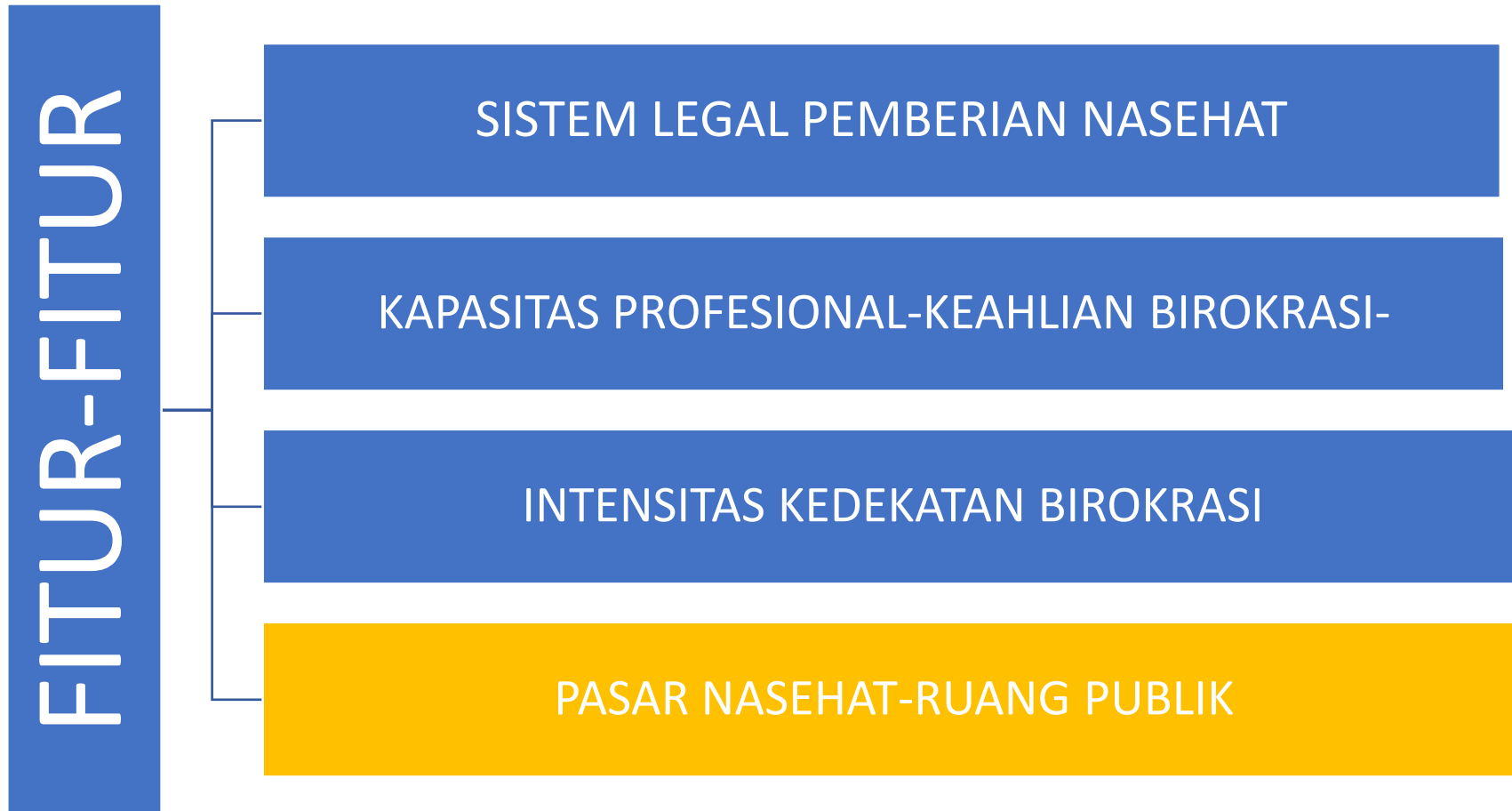
Peran strategis dan dukungan birokrasi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan public (proses politik) bermuara pada dua fungsi, yaitu:

- 1) bagaimana birokrasi pemda memberikan nasehat pejabat public dalam **menguraikan pilihan kebijakan** yang tersedia bagi pejabat politik;
- 2) bagaimana birokrasi memberikan nasehat untuk melakukan **peninjauan kebijakan** dalam kaitannya dengan dampak dan konsekuensi yang ditimbulkannya bagi masyarakat secara professional.

FITUR-FITUR BIROKRASI SEBAGAI POLICY ADVISOR (

- 1) ketersediaan dukungan **sistem** yang secara legal dalam pemberian nasihat (Heywood (2013);
- 2) **kapasitas** profesional dari birokrat pemerintah yang mumpuni, termasuk membangun intensitas **komunikasi dan kedekatan profesional** birokrat dengan politisi (Heywood (2013);
- 3) dukungan dan ketersediaan **ruang public/ kebersamaan** dengan aktor-aktor diluar birokrasi pemerintah sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi governance-deliberative ((Heywood (2013);

FITUR-FITUR BIROKRASI PILICY ADVISOR

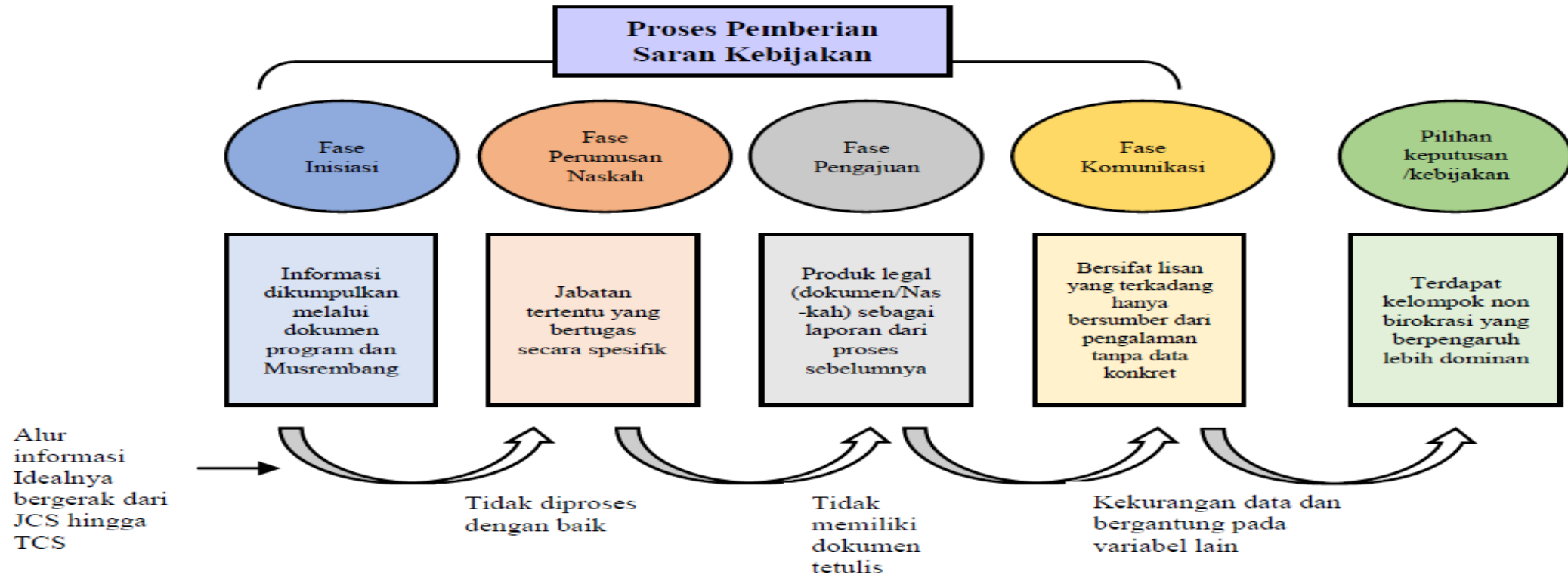


MATRIK HASIL PENELITIAN

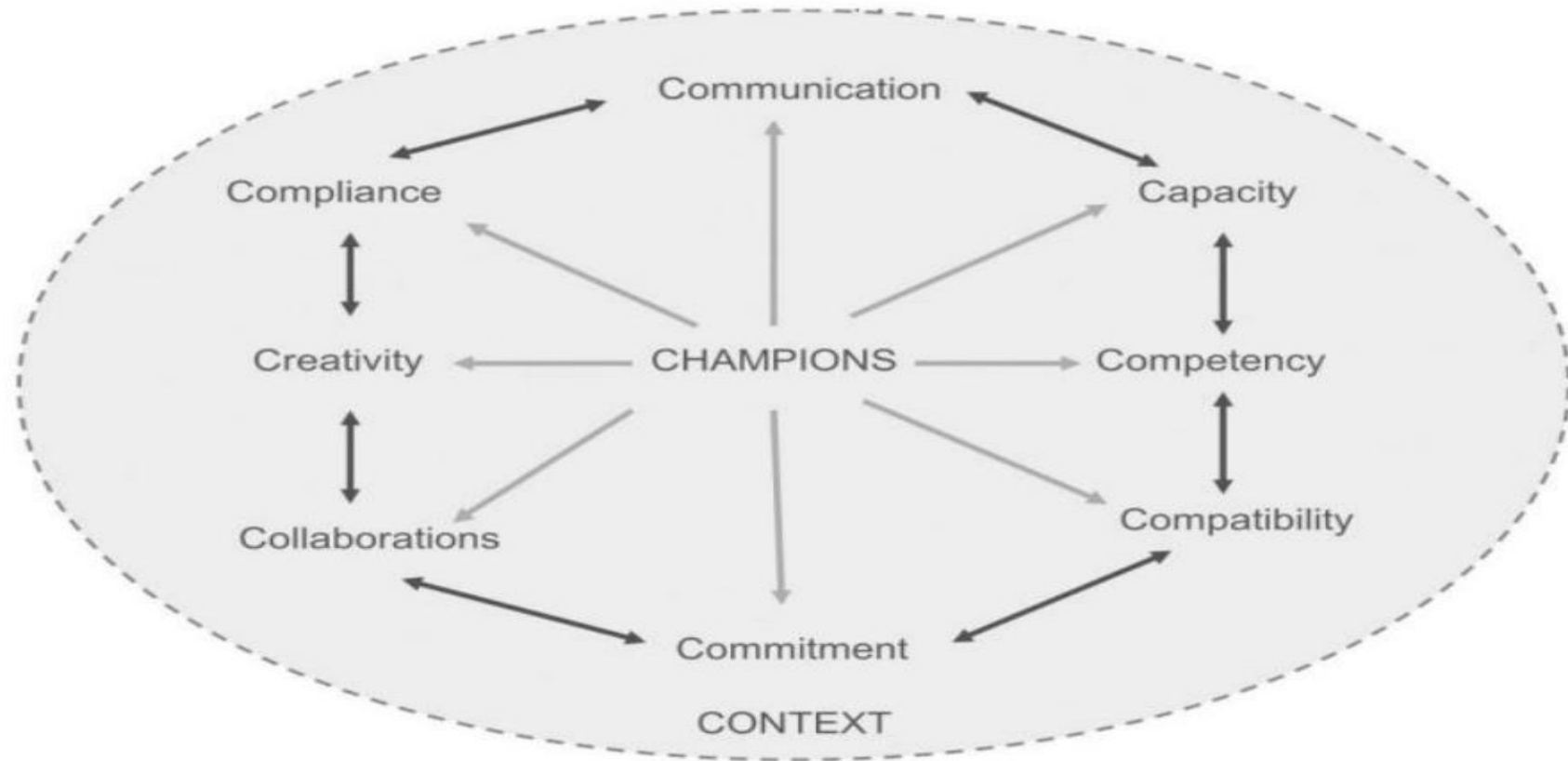
Matriks Hasil Penelitian

Aspek	Dimensi Penarikan Data	Temuan
Sistem Pemberian Nasihat	- Fase Inisiasi - Fase Perumusan Naskah - Fase Pengajuan - Fase Komunikasi	- Fase inisiasi dan fase perumusan naskah adalah aktivitas rutin birokrasi, kapasitas aparatur sangat memengaruhi kedua fase ini - Fase pengajuan merupakan fase yang muncul saat ada kondisi yang membutuhkan analisis, sejauh ini tidak ditemukan dokumen yang sangat menentukan kekuatan fase ini - Fase komunikasi rawan mengalami distorsi informasi sebab ketiadaan dokumen, juga kemampuan birokrasi ditentukan oleh faktor kedekatan personal namun masih didominasi oleh faktor sosial-kultural
Kapasitas Keahlian Profesional Birokrasi	Kesesuaian kompetensi birokrasi dengan prasyarat jabatan yang menjadi tuntutan personal	- Birokrasi daerah masih jauh dari konsep birokrasi berkeahlian profesional, dapat dilihat dari tidak sinkronnya kompetensi jabatan dan prasyarat yang dimiliki, minimnya pengalaman, dan minimnya pelatihan teknis sesuai sektor yang diikuti dan akibat masifnya rotasi jabatan
Intensitas Kedekatan Birokrasi	Kemampuan birokrat mempengaruhi pejabat politik	Posisi birokrasi lemah karena: - Birokrasi dianggap sebagai bawahan, bukan mitra kerja - Peran aktor politik semisal legislatif - Adanya “kelompok pembisik” yang dekat secara personal dengan pejabat politik

SISTEM LEGAL



PERKEMBANGAN/TREND FITUR PENDEKATAN BERBASIS BUKTI (EVIDENCE/EPP)



KOMUNIKASI:

❖ IT/TEKNOLOGI

- ❖ OPSI UNTUK DISEMINASI: strategi yang menyediakan ruang bagi pembuat kebijakan dan praktisi untuk mencari, membaca, merenungkan, bertukar ide dan mendiskusikan bukti penelitian (Nutley, et al., 2007).
- ❖ PENGGUNA AKHIR memiliki input ke dalam desain program atau mereka dilibatkan.

KAPASITAS

- ❖ KAPASITAS generik yang diperlukan untuk mendukung proses *EBPP*, terutama proses pemanfaatan penelitian sebagai bagian dari pengembangan kebijakan arus utama dan evaluasi sebagai fitur pemberian layanan (pembuatan basis data terlebih dahulu untuk mengumpulkan informasi tentang kelompok klien, dampak program, faktor risiko masyarakat atau model “*best practice*”).
- ❖ ADOPSI INISIATIF yang spesifik berkaitan dengan kapasitas

KOMPETENSI

- ❖ pengetahuan eksplisit dan implisit yang terkait dengan pengalaman kebijakan / praktik sebelumnya yang dapat memberikan wawasan tentang keberhasilan implementasi pendekatan berbasis bukti (Pelatihan keterampilan dan basis pengetahuan, dan penyediaan pedoman "*best practice*");

KOMPATIBILITAS

- ❖ kesesuaian antara prinsip-prinsip yang menopang kebijakan atau praktik berbasis bukti dan cara organisasi beroperasi

KOMITMEN

- ❖ Komitmen memiliki pengaruh penting pada kepatuhan dan adaptasi ;

KOLABORASI

- ❖ kolaborasi di antara beberapa penyedia layanan karena sifat kebijakan publiknya kompleks, dan berada di luar kemampuan lembaga mana pun untuk ditangani (Head, 2008a & 2008b, Head, 2008c).
- ❖ Kolaborasi mencakup : pengaturan berbagi data, melaksanakan proyek percontohan, atau mereplikasi *"best practice"*;

KREATIVITAS (REPILKASI DAN ADAPTASI)

- ❖ **REPLIKA:** menyediakan ruang untuk inovasi dan eksperimen. Memiliki beberapa tingkat fleksibilitas dalam bagaimana *EBPP* harus disampaikan memberikan ruang bagi lembaga pelaksana untuk berinovasi dengan memodifikasi program agar sesuai dengan kondisi setempat. Jika didokumentasikan dengan baik, dapat membangun pengetahuan penting tentang apa yang berhasil dan dalam kondisi apa.
- ❖ **ADAPTASI:** Mempertahankan kepatuhan tetap penting, karena memberikan dasar yang diperlukan untuk pengetahuan tentang pendekatan berbasis bukti. Sangat relevan untuk memahami apakah kebijakan dan praktik dapat ditiru atau ditransfer secara lintas konteks

KEPATUHAN

- ❖ Kepatuhan dengan konten program yang disepakati akan ditingkatkan dengan upaya yang fokus pada proses pengiriman dukungan berikutnya yang sudah dibahas. Pelatihan staf yang intensif tentang implementasi akan membantu memastikan kepatuhan (menangani masalah kompetensi) dengan mengklarifikasi peran para pembuat kebijakan dan praktisi.;

CHAMPION/JUARA-JUARA

- ❖ peran juara tersebut dipusatkan dalam keseluruhan sistem dukungan dan dihubungkan dengan “utuh” elemen
- ❖ difusi inovasi menunjukkan bahwa agensi yang merupakan pengadopsi awal inovasi ditandai dengan memiliki perantara (mis. Pemimpin opini dan agen perubahan) yang memainkan peran kunci dalam meyakinkan orang lain untuk mengadopsi inovasi tertentu (Rogers, 2003).
- ❖ Peran-peran penghubung atau keterkaitan ini juga dianggap penting untuk memahami proses pemanfaatan penelitian dalam berbagai konteks kebijakan dan praktik (Nutley, et al 2007).

PERKEMBANGAN/TREND POLICY ENTREPRENEUR

PERKEMBANGAN birokrasi publik dan proses-proses kebijakan :

pertama:

Proses normal pembuatan kebijakan tidak berlaku lagi, dimana ada upaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan monopoli birokrasi pemerintah atas nasehat kebijakan melalui *outsourcing* pembuatan kebijakan pada aktor-aktor diluar pemerintah. Hal ini mau tidak mau suka tidak suka harus ada sinergi/kerjasama multi kompetensi dalam mengatasi masalah, multi aktor dan multi institusi, kebutuhan membangun model kolaborasi public, private, people, philanthropy;

Kedua,

Berkembangnya kebutuhan sekaligus tuntutan big data dan artificial intengensia (AI) dalam proses pembuatan kebijakan/keputusan;

Ketiga,

Integrasi rill kepakaran dalam proses kebijakan dengan kemunculan masalah masalah sosial baru yang menuntut birokrasi proaktif serta pengalaman dan eksperimen kerja dengan kemajuan teknologi

Policy Entrepreneur

- Kemauan untuk menginvestasikan sumber daya pengetahuan dan komitmen dalam kebijakan
- Well-connected actor (jaringan aktor)
- Membangun konten, konteks dan proses perubahan
- Sebagai katalist kebijakan mengartikulasikan ide dalam komunitas dan koalisi untuk perubahan yang inovatif
- Memberikan opsi opsi kebijakan yang rasional

PERAN POLICY ENTREPRENEUR



KOMPETENSI POLICY ENTREPRENEUR

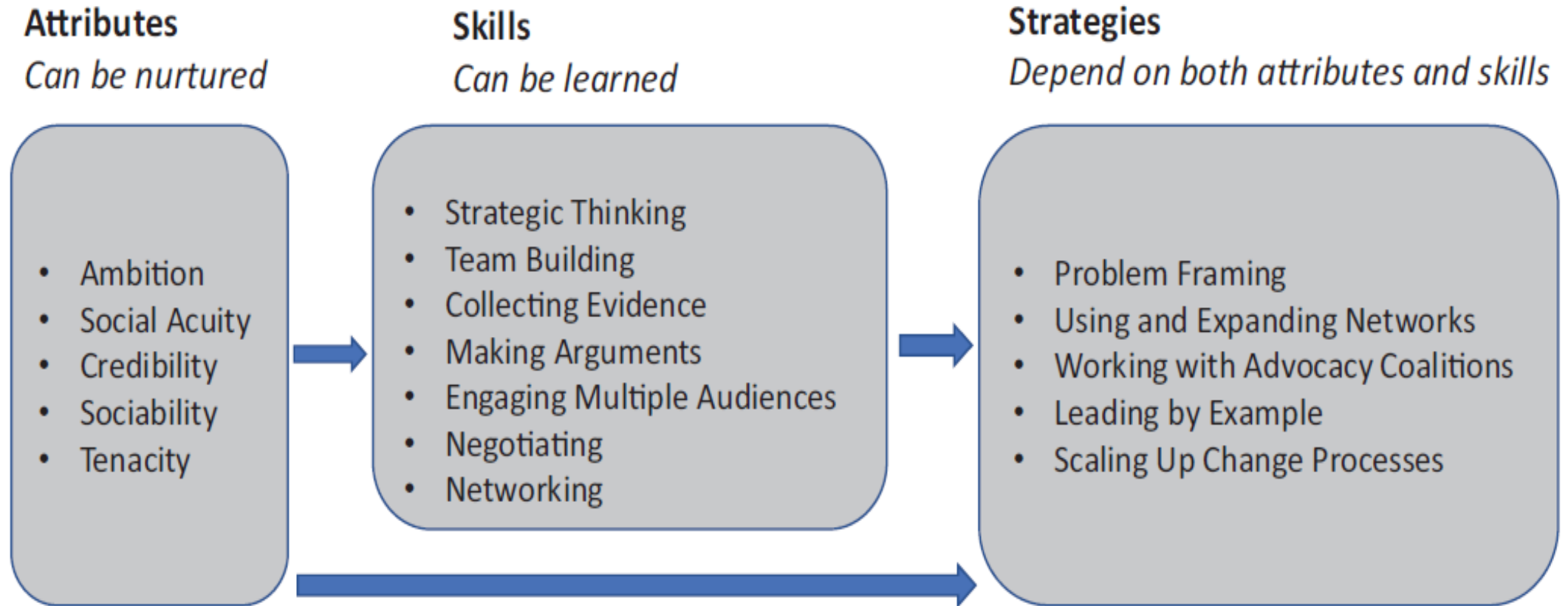


Figure 1. Common attributes, skills, and strategies of policy entrepreneurs.

TUGAS-DISKUSI

Tantangan untuk Policy Entrepreneur

- Memahami Institutional context
- Memahami Political context
- Memahami berbagai perbedaan *Values, Culture, Beliefs* aktor aktor dalam proses kebijakan

